

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA
BANDARLAMPUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19
TAHUN 2020**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu
Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh

**AJENG GAYATRI
NPM : 1731040022**

Prodi : Pemikiran Politik Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2021 M**

**“ EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA
BANDARLAMPUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19
TAHUN 2020 ”**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu
Ushuluddin dan Studi Agama



Pembimbing I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si

Pembimbing II : Abdul Qohar, M.Si

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2021 M**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA BANDARLAMPUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

Oleh
AJENG GAYATRI

Pelaksanaan Pemilihan Walikota Bandarlampung di masa pandemi Covid-19 berlandaskan pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau/ Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19) dan di selenggarakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandarlampung Nomor:205/PL.02-Kpt/1871/KPU-.Kot/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Bandarlampung Lanjutan Tahun 2020, dengan melibatkan 126 kelurahan dan 20 kecamatan salah satunya yakni Kecamatan Sukarame. Pelaksanaan Pemilihan Walikota ditengah pandemi Covid-19 mengundang kekhawatiran masyarakat karena setiap hari kenaikan angka terinfeksi virus corona terus bertambah dan telah banyak memakan korban jiwa, yang mana Kecamatan Sukarame merupakan salah satu wilayah terbanyak kasus positif terinfeksi virus tersebut. Masyarakat menilai bahwa keputusan tersebut tidaklah tepat dan menganggap tidak mengutamakan kesehatan serta keamanan bagi masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung yakni kota Bandarlampung dinilai menjadi daerah tertinggi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) berdasarkan analisis beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kondisi pandemi Covid-19 yang melanda sehingga proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial serta penggunaan teknologi informasi yang meningkat tanpa disertai penyediaan perangkat sumber daya penyelenggaraan pemilihan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif

yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan pemilihan wali kota Bandarlampung pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dalam ruang lingkup kecamatan sukarama. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian ini terdapat 10 informan dengan metode pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling*. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan wali kota Bandarlampung pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dalam ruang lingkup Kecamatan Sukarama terlaksana dengan Efektif terbukti dengan penyelenggaraan pemilihan wali kota yang aman menggunakan protokol kesehatan baik dari panitia penyelenggara dan tempat pemungutan suara. Kemudian didukung oleh masyarakat yang mulai beradaptasi dengan situasi pandemi Covid-19 dan angka partisipasi pemilih mengalami peningkatan dari pemilihan wali kota sebelumnya.

Kata Kunci : Efektivitas, Pilwakot, Pandemi

SURAT PERNYATAAN

Assalamua'laikum warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ajeng Gayatri
NPM : 1731040022
Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***“Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020”*** adalah benar-benar hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi atau salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terdapat penyimpangan dari karya ini maka sepenuhnya tanggung jawab peneliti.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta dengan penuh kesadaran, untuk itu harap dimaklumi.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, Oktober 2021

Peneliti,



Ajeng Gayatri

NPM. 1731040022



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukairame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721)780887

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020

Nama Mahasiswa : Ajeng Gayatri

NPM : 1731040022

Prodi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si

NIP.197503172003121003

Abdul Qohar, M.Si

NIP.197103122005011005

Mengetahui,

Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

NIP. 197801302011012004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721)780887

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020”**. Disusun oleh: **Ajeng Gayatri NPM: 1731040022**, Program Studi: **Pemikiran Politik Islam**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal: **Selasa, 26 Oktober 2021** pukul: **13.00-15.00 WIB**.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

: Dr. Idrus Ruslan, M.Ag.

Sekretaris

: Yoga Irawan, M.Pd.

Penguji Utama

: Drs. Agustamsyah, M.I.P.

Penguji Pendamping I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si.

Penguji Pendamping II : Abdul Qohar, M.Si.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama

Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag.

NIP. 196003131989031004



MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ
بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ۖ

Artinya : Dari Abdilllah Radiyallahu Anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, “Wajib untuk mendengar dan mentaati (pemimpinnya) atas seorang muslim, baik suka maupun terpaksa. Kecuali bila dia diperintah untuk kemaksiatan. Jika dia diperintah untuk kemaksiatan, tidak ada kewajiban baginya untuk tunduk dan patuh kepada pemimpinnya.”

(HR.Bukhari)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan alhamdulillahirobilalamin dan penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya kepada Allah SWT atas segala nikmat-Mu, kau jadikan aku seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu dan beriman kepada-Mu. Skripsi ini akan ku persembahkan untuk orang terdekat yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama peneliti menuntut ilmu:

1. Teruntuk kedua orangtua ku, Ayah Isen dan Ibu Umi Yuhati yang telah sangat berjasa dalam hidupku, terimakasih atas segala cinta kasih sayang yang tidak terhingga, doa, pengorbanan, jerih payah dan dukungan yang selalu diberikan hingga terselesainya skripsi peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin ya rabbal alamin.
2. Teruntuk adik ku tercinta M.Iqbal Al-farizi dan Keyla Safira Maharani yang selama ini juga memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan kepada peneliti.
3. Teruntuk keluarga besar dari Ayah dan Ibu yang juga senantiasa mendukung, mendoakan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Ajeng Gayatri lahir pada tanggal 29 Februari 2000 di Tulung Selapan, Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak Isen dan Ibu Umi Yuhati.

Peneliti mulai menempuh pendidikan formal di TK Dharma Wanita Tulung Selapan Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan SD N 2 Tulung Selapan Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren MTS AL-ISHLAH Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan lulus pada tahun 2014. Lalu melanjutkan pendidikan SMA N 1 Tulung Selapan Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan lulus pada tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2017, peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri yaitu UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada program Studi Pemikiran Politik Islam, untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, maka peneliti menyusun skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020”**. Semoga ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayahnya, penyusunan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Walikota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikutinya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar (S1) Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat bantuan dari berbagai pihak yang berupa bimbingan, petunjuk, kritik, saran dan dukungan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Mohammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Bapak Dr.H.M. Afif Anshori, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Alm. Dr. M. Sidi Ritaudin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi dalam bidang akademik semasa dibangku perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu luang, pengetahuan, arahan dan saran terhadap Peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Bapak Abdul Qohar, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu luang, pengetahuan, arahan dan saran terhadap Peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama khususnya di Prodi Pemikiran Politik Islam.
8. Seluruh staf dan kepegawaian dari tingkat Dekanat sampai pada tingkat paling bawah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang memperkenalkan peneliti untuk meminjamkan literature Penelitian skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Komisioner KPU Kota Bandarlampung beserta Staf dan Sekretaris Camat Sukarame beserta Staf yang telah membantu kelancaran dalam penelitian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat ku tersayang yang tergabung dalam grub Netijen Julid yaitu Deny Ayu Fitriana S.Sos, Jenita Permata Sari, S.Sos, Rachma Octariani, S.Sos, Irma Deviana, S.Sos, Siti Nur Azizah S.Sos, Yuliana, S.Sos, Eva Rosalia, S.Sos yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan bersedia menjadi teman diskusi serta bertukar pikiran selama dibangku perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat healingku Kenny Purnama Sari, S.E yang selalu setia menemani proses healing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini dan selalu memberi support serta bantuan kepada peneliti.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Pemikiran Politik Islam kelas B angkatan 2017 yang telah saling support dan selalu saling memberikan informasi demi kelancaran satu sama lain.
14. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandarlampung Komisariat Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung yang selalu memberikan support kepada peneliti
15. Almamater tercinta tempat ku mencari ilmu yang bermanfaat dunia akhirat UIN Raden Intan Lampung, semoga selalu jaya dan dapat mencetak generasi-generasi terbaik.

16. Last but not least, I want to thank myself, I want to thank myself for believing in me, I want to thank myself for doing all this hard work, I want to thank myself for having no days off, I want to thank myself for never quitting, for just being me at all times.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti maupun bagi pembacanya.

Bandarlampung, Oktober 2021
Peneliti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	14
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penelitian	25

BAB II. EFEKTIVITAS PEMILIHAN WALIKOTA

A. Efektivitas	
1. Pengertian Efektivitas	29
2. Indikator Efektivitas	32
3. Model Efektivitas	36
4. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	38
B. Pemilihan Walikota	
1. Pengertian Pemilihan Walikota	41
2. Dasar Hukum Pemilihan Walikota.....	47
3. Partisipasi Pemilih.....	50

BAB III. GAMBARAN UMUM KOTA BANDARLAMPUNG DAN KECAMATAN SUKARAME

A. Profil Kota Bandarlampung	
1. Sejarah Singkat Kota Bandarlampung	55
2. Letak Geografis Kota Bandarlampung.....	56
3. Topografi Kota Bandarlampung	58
4. Demografi Kota Bandarlampung	58
5. Pemerintahan Kota Bandarlampung	62
B. Profil Kecamatan Sukarame	
1. Sejarah Kecamatan Sukarame	63
2. Perkembangan Wilayah Kecamatan Sukarame...	63
3. Geografi Kecamatan Sukarame.....	64
4. Demografi Kecamatan Sukarame.....	67
5. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Sukarame.....	70

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Walikota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020	73
---	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Rekomendasi	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Primer	12
1.2 Data Sekunder.....	13
3.1 Luas Geografis Wilayah Kota Bandarlampung	32
3.2 Daftar Nama-Nama Kecamatan di Kota Bandarlampung.....	33
3.3 Daftar Walikota Bandarlampung dari Periode ke Periode	35
3.4 Luas Wilayah Kecamatan Sukarame	37
3.5 Penggunaan Tanah di Kecamatan Sukarame	37
3.6 Data Kependudukan Se-Kecamatan Sukarame Tahun 2021	38
3.7 Data Penduduk Sukarame Menurut Umur Tahun	38
3.8 Data Penduduk Sukarame Menurut Pendidikan Tahun	39
3.9 Data Penduduk Sukarame Menurut Agama Tahun ...	39
3.10 Data Penduduk Sukarame Menurut Mata Pencaharian.....	39
3.11 Nama-Nama Pejabat Se-Kecamatan Sukarame	40
4.1 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Masyarakat Kota Bandarlampung Pada Pilwakot Tahun 2015	65
4.2 Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Sukarame Pada Pilwakot 2015	65
4.3 Partisipasi Masyarakat Kecamatan Sukarame Pada Pilwakot 2015	66
4.4 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Masyarakat Kota Bandarlampung Pada Pilwakot Tahun 2020	66
4.5 Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Sukarame Pada Pilwakot 2020	66
4.6 Partisipasi Masyarakat Kecamatan Sukarame Pada Pilwakot 2020	67



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandarlampung
2. Lampiran Surat Balasan Penelitian KPU Kota Bandarlampung
3. Lampiran Surat Balasan Kecamatan Sukarame
4. Lampiran Surat Persetujuan Pembimbing
5. Lampiran Surat Konsultasi Bimbingan
6. Pedoman Wawancara
7. Hasil Wawancara
8. Hasi Turnitine



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal menghindari kesalahpahaman judul skripsi ini, peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dari judul skripsi ini penulis perlu memberikan penegasan judul, adapun judul skripsi ini adalah “ **Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020** ”.

Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami maksud dari judul ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis. Berikut beberapa istilah yang terkandung dalam judul.

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku).¹

Menurut Steers Efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²

Menurut Gibson Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 250

² Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Airlangga, 1998), h. 1

oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.³ Jadi maksud efektivitas dalam penelitian ini adalah keberhasilan dari pelaksanaan Pilwakot Kota Bandarlampung.

Menurut Westra yang dikutip oleh Rahardjo Adisasmita, Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.⁴

Pemilihan Wali kota (pilwakot) adalah satu sistem kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan secara Demokratis, Transparan, Jujur dan Adil yang mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung oleh rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya.⁵ Jadi pemilihan wali kota yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemilihan Walikota Bandarlampung Tahun 2020 bersamaan dengan peristiwa wabah Covid-19 dalam lingkup wilayah Kecamatan Sukarame.

Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) adalah Penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2 (SARS-Cov-2). Covid-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.

Berdasarkan penegasan judul diatas, maka maksud dari judul skripsi ini adalah penelitian membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Wali kota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 dalam Lingkup Wilayah Kecamatan Sukarame .

³ Gibson, JL JM dan JH Donelly, *Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 120

⁴ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.12

⁵ Nadir Ahmad, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, (Malang: Averroes Press, 2006), h. 89

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum.⁶

Pada sistem pemerintahan Indonesia mengacu pada bentuk negara Indonesia hal ini dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yang menyatakan bahwa “ kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ”. Negara Indonesia sendiri merupakan negara yang berbentuk republik, hal ini dibuktikan pada Pasal (1) ayat (1). Menurut UUD 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.⁷

Demokrasi sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.⁸

Setiap negara yang berdaulat kekuasaan tertinggi atas keputusan-keputusan politik yang diambil terletak pada suatu tempat dalam struktur politik pemerintahan. Di dalam negara demokrasi kekuasaan tertinggi harus diletakkan pada tangan seluruh rakyat, bukan pada salah satu elit atau kelompok tertentu

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 268

⁷ Suaiba, *Efektivitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi pemerintahan Kecamatan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No. 2, Tahun 2020, h. 239

⁸ Ibid, h. 293

dalam negara tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat ini bukan berarti bahwa seluruh rakyat secara langsung membuat keputusan atau kebijakan sehari-hari dalam setiap urusan dan aktivitas pemerintahan. Demokrasi yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat ini bukan berarti setiap perizinan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan baru dikatakan sah jika seluruh rakyat ikut beramai-ramai membuat keputusan.

Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis oleh rakyat dapat dipinjamkan atau didelegasikan kekuasaan membuat keputusan atau kebijakan itu kepada legislatif, eksekutif, yudikatif, administrator atau kepada siapapun yang dikehendaki sebagai wakilnya. Rakyat dikatakan berdaulat sepanjang mereka, bukannya wakilnya, masih mempunyai kekuasaan tertinggi (*ultimate power*) untuk memutus, dimana kekuasaan membuat keputusan tetap berada ditangannya dan yang bisa didelegasikan kepada siapa saja yang bisa bertanggung jawab pada periode waktu tertentu.⁹

Sebuah negara demokrasi mempunyai nilai unggul tersendiri, didalam setiap pengambilan keputusan serta kebijakan harus tetap mengacu kepada aspirasi dari masyarakat pada negara itu sendiri. Masyarakat dalam negara tersebut merupakan point terpenting dan menjadi yang utama dalam sebuah negara karena peranan masyarakat dalam sebuah negara demokrasi adalah partisipasinya dalam perpolitikan untuk menentukan pemimpin baik dari tatanan pemerintah pusat maupun daerah.

Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan politik.¹⁰ Demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai

⁹ Miftah Thoha, *Birokrasi&Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.99-101

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011),h.248

salah satu bentuk sistem politik yang terbaik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara.¹¹

Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan di dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun kedepan. Pemilu merupakan sebuah pintu gerbang untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang dapat legitimasi luas dari masyarakat. Jika pemilu dilaksanakan secara demokratis, adil, jujur, langsung dan rahasia, maka terwujudlah pemilu yang berkualitas sangat tergantung bagaimana tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara baik. Tahapan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.¹²

Politik dan demokrasi memiliki kaitan yang erat dengan partisipasi. Dimana partisipasi politik adalah salah satu aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi. Keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan yang dibuat oleh pemerintah.¹³

Pemilihan Wali kota merupakan sebuah fenomena yang cukup hangat menjadi bahan pembicaraan ditengah masyarakat sekarang. Pemilihan wali kota adalah sebuah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjadi momentum politik besar untuk menuju demokratisasi. Pada kegiatan pemilihan kepala daerah masyarakat diharapkan ikut terlibat dalam kegiatan pemilihan tersebut dan ikut dalam pengambilan keputusan dan ikut dalam memilih pemimpin kepala daerah yang menjadi pilihannya.

¹¹ Ibid, h. 252

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 28

¹³ Adi Abdul Kadir, Michael Mamentu, Trintje Lambey, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan di Kecamatan Tidore Tahun 2015*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan . Vol. 2, No. 2, Tahun 2017, h. 2

Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih kepala daerah ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur ditingkat provinsi dan bupati/wali kota ditingkat kabupaten/kota. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak terlepas dari peraturan mengenai pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, menurut UU ini, Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota (Selanjutnya di sebut kepala daerah dan wakil kepala daerah) mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan ke hidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah dan daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan figure kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mengemban inovasi, berwawasan ke depan dan siap melaksanakan perubahan kearah yang lebih baik.¹⁴

Dalam pemerintahan tentunya sangat diperlukan pemimpin yang adil dan tidak akan berbuat zalim kepada rakyatnya merupakan hal yang sangat utama untuk menjadi seorang pemimpin kepala daerah, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi :

﴿ وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ

إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

Artinya : Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata,

¹⁴ Muhammad Zein Abdullah, *Strategi Komunikasi Politik dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*, Jurnal Observasi. Vol. 6, No. 1, Tahun 2008, h. 101

“Dan (juga) dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”

(QS. Al-Baqarah ayat 124).¹⁵

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin harus adil dan orang-orang zalim tidak boleh menjadi pemimpin. Nabi Ibrahim adalah hamba Allah SWT, setelah melalui proses pendekatan diri kepada Allah SWT, hingga naik menjadi kekasih Allah atau Khalilullah. Setelah menjadi khalilullah naik lagi menjadi Rasulullah dan saat beliau menjadi Rasulullah SAW, Allah Ta’ala mengangkatnya menjadi imam bagi seluruh manusia. Saat Ibrahim berharap agar semua keturunannya menjadi imam, Allah Ta’ala menjawab bahwa kepemimpinan tidak akan jatuh ke tangan orang-orang zalim.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah. Pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal 18 (4) UUD 1945, dan pada era reformasi dan seterusnya pemilihan kepala daerah diatur lebih jelas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian di revisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 karena dianggap tidak sepenuhnya aspiratif sehingga menimbulkan banyak kritikan. Berdasarkan pasal 56 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia. Jujur dan adil.¹⁶

Pada tanggal 9 Desember 2015 merupakan babak baru dalam pemilihan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia, karena pada tahun ini untuk pertama kalinya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota, yaitu daerah provinsi dan

¹⁵ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul, Ali Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung:Jumanatul Ali-Art, 2004)

¹⁶ M. Noor Aziz, *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tahun 2011, h. 49

kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Hal ini sebagaimana tersebut dalam UU No.8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang pasal 201 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015”.¹⁷

Pemilihan wali kota yang dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama di beberapa wilayah memberikan makna tersendiri bagi reformasi “bebas–rahasia”. Pemilihan walikota merupakan upaya untuk menciptakan akuntabilitas lokal, kesetaraan politik dan respon lokal. Dengan begitu, demokrasi ditingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu pemilihan walikota juga harus mampu mengantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pemilihan wali kota yang dilakukan secara profesional, demokratis akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemilihan walikota melahirkan berbagai konflik yang diantaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara pemilu, serta kurangnya kepatuhan peserta pemilu dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku.

Pemilihan Wali kota kembali digelar pada 2020. Pemilihan kepala daerah yang akan digelar di 270 daerah yang awalnya direncanakan pemungutan suaranya pada september 2020 dan Komisi Pemilihan Umum telah memulai tahapan penyelenggaraan sejak oktober 2019. Namun pada 2020, ternyata pilkada jadi berbeda dan tidak biasa dibandingkan penyelenggaraan-penyelenggaraan periode sebelumnya karena saat ini dunia termasuk Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19. Wabah ini

¹⁷ KPU (Komisi Pemilihan Umum), <https://data.kpu.go.id/dps.2015.php>. (Diakses pada Senin 1 September 2020)

ternyata menular dengan cepat melalui tetesan kecil atau droplet dari orang yang positif terjangkit Covid-19 dan kasus pertama di Indonesia dilaporkan pada awal maret lalu. Setelah kasus pertama tersebut, jumlah masyarakat yang positif Covid-19 kian hari kian meningkat dan membuat pemerintah menyatakan kasus darurat bencana, sementara WHO pun menetapkan Covid-19 sebagai pandemi untuk dunia.

Mempertimbangkan kasus tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 21 maret 2020 memutuskan untuk menunda tahapan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten dan wali kota (Pilkada) serentak sebagai upaya penyebaran Covid-19. Penundaan tersebut tertuang dalam keputusan Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan keputusan KPU tersebut. Kemudian penundaan itu juga berdasarkan pernyataan presiden Joko Widodo tentang penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam serta keputusan kepala BNPB terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia.

Setelah ditunda selama tiga bulan lamanya karena mengingat kondisi ketika itu, akhirnya pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan penyelenggara pemilu sepakat memutuskan kembali melanjutkan tahapan, kemudian hari pemungutan juga bergeser menjadi 9 Desember 2020. Dengan beralih pada Peraturan KPU (PKPU) No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau/ Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19.

Di Lampung terdapat 8 Kabupaten/Kota yang akan menggelar pesta demokrasi salah satunya ialah Kota Bandarlampung yang akan melaksanakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandarlampung Nomor:205/PL.02-Kpt/1871/KPU-.Kot/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali kota dan Wakil

Wali kota Bandar Lampung Lanjutan Tahun 2020.¹⁸ Dengan melibatkan 126 Kelurahan dan 20 Kecamatan yang ada di kota Bandar Lampung. Adapun tokoh-tokoh kandidat yang maju dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung ialah Rycko Menza-Johan Sulaiman, Yusuf Kohar-Tulus Purnomo dan Eva Dwiana-Deddy Amrullah. Ketiga paslon kepala daerah itu resmi mengikuti pilkada 2020 setelah ditetapkan dalam rapat pleno tertutup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung.

Menurut Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di provinsi Lampung, kota Bandar Lampung dinilai menjadi daerah yang tertinggi indeks kerawanan pemilu (IKP) berdasarkan analisis dari pihaknya daerah yang memiliki kerawanan tinggi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti, kondisi pandemi covid-19 yang tidak melandai hingga kini proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial serta penggunaan teknologi informasi yang meningkat tanpa disertai penyediaan perangkat sumber daya penyelenggaraan pemilihan.¹⁹ Dari 20 kecamatan yang ada di kota Bandar Lampung, pada saat itu kasus terbanyak berada di kecamatan Sukarame. Jadi peneliti dalam penelitian ini menitik fokuskan penelitian pada wilayah Kecamatan Sukarame.

Pernyataan mengenai kembali melanjutkan penyelenggaraan pemilihan walikota tahun 2020 harus tetap dilaksanakan di tengah pandemi virus corona menuaikan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pemerintah dinilai masyarakat tidak tepat dan presiden tidak mengutamakan keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat Indonesia yang mana kasus positif terinfeksi Covid-19 setiap hari semakin bertambah dan angka kematian terus naik. Seperti banyak yang masyarakat ketahui bahwa momentum politik seperti pilkada ini tentunya akan banyak menimbulkan kerumunan di setiap tahapan prosesnya serta akan menggunakan anggaran yang lebih banyak dari biasanya dan menurut

¹⁸ <https://jdih.kpu.go.id> (Diakses Minggu 13 September 2020)

¹⁹ <https://ftp.saibumi.com>. (Diakses Selasa 15 September 2020)

masyarakat pemerintah seharusnya lebih fokus pada penanganan penekanan penyebaran virus tersebut. Seharusnya, dalam era reformasi pengambilan keputusan tidak lagi berdasarkan hal-hal yang bersifat intuisi tetapi harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional.²⁰

Terdapat banyak kritik mengenai tetap dilaksanakannya pilkada serentak tersebut, salah satunya dari Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini sepakat bahwa pelaksanaan pilkada perlu ditunda kembali selama masa pandemi berlangsung karena jika dilaksanakan untuk digelar akan ada beragam hal yang mengganjal pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah sangat rawan dengan pelanggaran-pelanggaran. Diantaranya menguatnya politik transaksional yakni calon petahana memanfaatkan bantuan sosial ditengah krisis ekonomi masyarakat, bahwa oknum-oknum menggunakan pendekatan politik transaksional, uang dan barang ditengah situasi ekonomi yang memburuk untuk mendapatkan dukungan pemilih. Fakta dilapangan sudah terjadi beredarnya foto-foto kepala daerah dalam kemasan bantuan sosial, yang dianggap sebagai kampanye terselubung.²¹

Masyarakat berendapat bahwa, situasi darurat ini jangan dijadikan untuk kepentingan politik semata dan memanfaatkan kondisi sulit dan tentunya biaya yang dikeluarkan untuk pemilihan walikota juga bukan jumlah yang sedikit. Sangat sulit bagi masyarakat untuk melihat kesungguhan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah. Ketidakjelasan dan ketidak-transparanan proses pengambilan keputusan misalnya, membuat masyarakat selalu diliputi oleh berbagai pertanyaan. Apakah memang benar bahwa kepentingan mereka selalu memperoleh skala prioritas.²²

²⁰ Abdul Qohar, *Revitalisasi Manajemen Pemerintahan Modern*, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam. Vol. 8, No. 2, Tahun 2012, h.147

²¹ <https://www.bbc.com> (Diakses pada Kamis 4 maret 2021)

²² Ali Abdul Wakhid, *Good Governance dan Reformasi Birokrasi Mendukung Pembangunan Hukum*, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam . Vol. 5, No. 10, Tahun 2009, h. 72

Memaksakan tahapan penyelenggaraan, hanya akan membuat penyelenggaraan pemilihan walikota yang tidak optimal. Bahkan banyak masyarakat yang terang-terangan menentang tetap dilaksanakannya pemilihan walikota dan akan memilih golput (golongan putih) sebagai bentuk kekecewaan terhadap keputusan pemerintah yang tidak fokus dalam menangani Covid-19. Tak hanya menuai banyak asumsi dari kalangan masyarakat saja akan tetapi sejumlah epidemiolog juga telah mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 berpotensi besar menciptakan lonjakan kasus Covid-19.

Pemilihan wali kota yang sering diartikan sebagai pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sangat mengkhawatirkan karena tetap dilaksanakan di saat negara sedang dilanda wabah tersebut. Pelaksanaan pemilihan walikota kali ini tentunya akan sangat berbeda dari pelaksanaan pilkada sebelum adanya virus ini, baik dari segi kampanye, sosialisasi dan tahapan yang lainnya.

Dalam pelaksanaan pemilihan wali kota pada 09 desember 2020 di Kecamatan Sukarame Kota Bandarlampung terdapat salah satu TPS yang surat suara hanya terpakai setengah karena masyarakat di daerah tersebut memilih untuk golput (golongan putih) tidak menggunakan hak suara yang mereka miliki. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan walikota yang aman serta ketakutan-ketakutan masyarakat dengan virus tersebut membuat masyarakat berpikir berkali-kali karena angka kasus positif dan kematian setiap hari terus bertambah karena virus covid-19. Hal ini membuat masyarakat sempat ragu untuk berpartisipasi dalam pemilihan walikota tersebut. Masyarakat yang belum sepenuhnya beradaptasi dan kurang maksimalnya sosialisasi yang diberikan pemerintah akan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan walikota tersebut. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa lebih baik tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara di saat pandemi Covid-19 karena lebih mengutamakan kesehatan diri dan keluarga serta sebagai suatu

sikap membantu memutus rantai penyebaran virus Covid-19 yang ada di Kecamatan Sukarame.

Atas keadaan ini permasalahan ini perlu diteliti untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan tepat tentang Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Wali kota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus membahas mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Wali kota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

D. Rumusan Masalah

Dari berbagai latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Wali kota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Kecamatan Sukarame?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah diatas tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk Menjelaskan Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Wali kota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Kecamatan Sukarame.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini sangat berguna untuk menambah hasanah ilmu dan dapat mengembangkan kajian studi Pemikiran Politik Islam karena pada penelitian ini

mempelajari tentang partisipasi politik masyarakat dan efektivitas pelaksanaan pemilihan wali kota ditengah pandemi Covid-19.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu Pemikiran Politik Islam dimasa yang akan datang serta sebagai rujukan dan referensi bagi akademisi yang akan melakukan suatu penelitian dengan tema yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi KPU Kota Bandarlampung berguna untuk mengetahui hasil dari proses penyelenggaraan pemilihan walikota Bandarlampung pada masa pandemi covid-19 yang mana setiap prosesnya dilakukan dengan berbagai aturan baru sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pilkada.
- b. Bagi masyarakat Kecamatan Sukarame dan pembaca berguna untuk menambah informasi terutama mengenai proses penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan wali kota yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka merupakan suatu bagian dari skripsi yang bersifat sentral. Artinya melalui suatu tinjauan pustaka tersebut, seseorang dapat mengetahui secara jelas, meskipun secara garis besar, tentang penelitian yang dilaksanakan, baik menyangkut masalah penelitian serta cara penelitian yang dilaksanakan.²³

Sejauh peneliti mencari sumber data tentang judul penelitian diatas, penelitian ini tidak sama dengan penelitian terdahulu. Meskipun terdapat kesamaan dalam bentuk buku, karya ilmiah dan skripsi yang mengkaji tentang Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Walikota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-

²³ Kaelan M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta:Paradikma,2005),h.74

19 Tahun 2020. Adapun karya ilmiah yang berhubungan dengan judul diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Erisanti, NPM: B1A010015, mahasiswa Universitas Bengkulu, Tahun 2014 yang berjudul “ Efisiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ”. Skripsi ini membahas tentang efisiensi dan efektivitas pemilukada langsung dan apa yang menjadi dampak positif dan negatif dari pemilukada langsung yang sudah lama berlangsung di Indonesia sesuai dengan tata cara pelaksanaan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau pustaka, dan menggunakan pendekatan Undang-Undang dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran internet dan buku-buku serta menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Metode yang digunakan penulis adalah metode analisis data deskriptif.
2. Jurnal Karya Aprista Ristyawati tentang Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemilihan umum disituasi darurat covid-19 yang mana wabah corona virus disease tahun 2019 ini makin merajalela dan penin gkatan lonjakan kasus semakin hari semakin bertambah dan penelitian ini juga membahas tentang dampak positif negatif tetap dilaksanakannya pilkada serentak 2020 ditengah pandemi covid-19 serta upaya-upaya yang dapat ditempuh agar pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik. Jenis penelitian kepustakaan, dan menggunakan Undang-Undang dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui buku-buku, jurnal, surat kabar serta menggunakan metode analisis data deskriptif.
3. Jurnal Karya Ingrried Fena Meylinaa dan Dewi Erowati tentang Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang kurangnya partisipasi politik

dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengatasi konflik antar pendukung calon dan pelaksanaan pilkada dimasa pandemi covid-19 di tana toraja. Kasus lonjakan Covid-19 yang masih tinggi dan pemungutan suara dibulan desember faktor cuaca yang tidak mendukung masyarakat dalam melakukan aktifitas akan membuat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih akan menurun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research dan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menurut sifatnya adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan mengutip buku, jurnal, dokumen dan media online serta menggunakan analisis data kualitatif model miles dan huberman yang meliuti reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

4. Jurnal Karya Triono tentang Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan keputusan MK mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjadi perdebatan publik, Undang-Undang pemilu yang baru disahkan sebagai payung hukum pemilu 2019 masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Secara teoritik pemilu serentak 2019 sangat memungkinkan untuk dilaksanakan apalagi melihat dinamika politik Indonesia semakin baik sejak reformasi namun hal utama yang harus menjadi kesepakatan bersama adalah sistem pemilu hanyalah sebuah instrument dalam sistem demokrasi, instrument ini tentunya dapat disesuaikan dan diubah tergantung kondisi dan tujuan suatu negara. Penelitian ini bersifat studi kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran tulisan jurnal, paper dan berita media serta menggunakan analisis data deskriptif.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang di perlukan.²⁴ Metode merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, adapun metode yang digunakan penulis dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.²⁵ Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁶ Berdasarkan pengertian diatas, penulis menggunakan metode ini karena ingin memperoleh gambaran di lapangan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Wali kota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan sifat suatu individu, gejala, keadaan dan situasi kelompok tertentu atau untuk menetapkan frekuensi adanya hubungan

²⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2008), h.9

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju 1996), h. 32

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya 2013), h.46

tertentu suatu gejala dalam masyarakat.²⁷ Metode deskriptif menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²⁸ Dipilihnya penelitian ini agar memperoleh paparan dan gambaran yang tepat mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Wali kota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Meolong mengutip Bodgan dan Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.²⁹

3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada aspek kualitas dan proses kegiatan objek yang akan diteliti, maka memerlukan sumber data yang benar-benar menjelaskan masalah pada penelitian. Data tersebut ialah:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer merupakan penuturan atau catatan para saksi mata. Data tersebut diperoleh pengamat atau partisipasi yang benar-benar menyaksikan suatu peristiwa.³⁰ Data primer juga dapat disebut dengan informan dimana informan

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia Pustaka 1981),h. 93

²⁸ Imam Suprayogo dan Tabroni,*Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*,(Bandung:Remaja Rosdakarya 2003),h.71

²⁹ Lexy J. Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2014),h.4

³⁰ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013),h.308

tersebut terdiri dari Key informan dan informan. Dalam penelitian ini untuk menentukan key informan menurut Sprandley dalam (Meolong), informan memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau lokasi aktifitas yang menjadi target atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang suatu yang ditanyakan.
2. Subyek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Subyek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan
4. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung di olah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka masih relatif, masih jujur dalam memberikan informasi.

Berdasarkan kriteria diatas , yang menjadi sumber informan dalam data primer dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Primer

No	Nama	Jabatan	Tempat dan Tanggal Wawancara
1.	Dedy Triadi	Ketua KPU Kota Bandarlampung	Kantor KPU, 07 Juni 2021
2.	Hamami	Ketua Divisi Sosialisasi dan Parmas KPU Kota Bandarlampung	Kantor KPU, 07 Juni 2021

3.	Ika Kartika	Ketua Divisi Program dan Data	Kantor KPU, 09 Juni 2021
4.	Udo Panji Ismoyo	Sekretaris kecamatan Sukarame	Kantor Kecamatan, 14 Juni 2021
5.	Suwarni	Tokoh Masyarakat	Kelurahan Sukarame, 17 Juni 2021
6.	Isjayanti	Tokoh Masyarakat	Kelurahan Waydadi, 17 Juni 2021
7.	Riska	Tokoh Masyarakat	Kelurahan Sukarame Baru, 17 Juni 2021
8.	Hanun	Tokoh Masyarakat	Kelurahan Harapan Jaya, 18 Juni 2021
9.	Tita	Tokoh Masyarakat	Kelurahan Waydadi Baru, 18 Juni 2021
10.	Messy	Tokoh Masyarakat	Kelurahan Korpri Raya, 18 Juni 2021

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³¹ Data sekunder adalah merupakan data yang sudah jadi atau di publikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang

³¹ Ibid, h. 94

mengumpulkan, mengolah dan menyajikan.³² Data sekunder dalam penelitian ini berupa arsip, foto, dokumentasi kegiatan dan lain-lain yang terkait objek penelitian. Data-data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian dan wawancara pada informan penelitian dapat dilihat dari tabel 2 yang dibedakan berdasarkan jenis data dan sifat data penelitian sehingga kedua data tersebut dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam karya tulis ilmiah.

Berdasarkan penjelasan diatas, data sekunder dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2

Sumber data sekunder

No.	Jenis Data	Sifat Data
1.	Monografi Kecamatan Sukarame	Arsip Kecamatan Tahun 2019-2021
2.	Data Partisipasi Pilkada 2020	Soft File
3.	Data Tingkat Partisipasi Pilkada 2020 Perkelurahan	Soft File
4.	Data Rekap Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020 Kota Bandarlampung	Soft File
5.	PKPU Nomor 13 Tahun 2020	Soft File
6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandarlampung Nomor: 205/PL.02-Kpt/1871/KPU-Kot/VI/2020	Soft File

³² Hadi Sutrisno, *Metodelogi Research*, (Jogjakarta:YPFAK,Psikologi UGM,1985),h.89

--	--	--

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³³ Jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana interviewer secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan interviewer. Wawancara terpimpin disebut juga dengan interview guide. Controlled interview atau structured interview, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Ciri pokok wawancara terpimpin ialah bahwa pewawancara terikat suatu fungsi bukan saja pengumpul data relevan dengan maksud penelitian yang telah di persiapkan, serta ada pedoman yang memimpin jalannya tanya jawab.³⁴ Yang diwawancarai dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 yaitu data informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat teori dalil dan

³³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op.Cit.*, h.83

³⁴ *Ibid.*, h. 84

hukum-hukum yang berhubungan dengan penyelidikan.³⁵ Jenis dokumen yang peneliti dapatkan seperti buku-buku, surat, dokumen yang berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Wali kota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

5. Partisipan dan Tempat Penelitian

a. Partisipan

Partisipan merupakan seseorang yang ikut serta pada penelitian skripsi ini, partisipan terkait pada informan atau aktor yang akan di interview atau wawancara. Adapun teknik pengambilan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana penetapan sampel atau informan diambil dari beberapa populasi dimana populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁶ Dalam hal ini peneliti menetapkan 10 informan dalam penelitian ini yang sudah dijelaskan di dalam data primer.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kecamatan Sukarame Kota Bandarlampung

6. Metode Analisis Data

Berikut merupakan teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang diperoleh dari lapangan penelitian yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci untuk

³⁵ Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jogjakarta: Garma Press,1987),h.133

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung:Alfabeta,2005),h.90

dilakukan penyederhanaan data memfilter data-data yang ada di catatan peneliti, dari proses berlangsungnya selama pelaksanaan penelitian bahkan sebelum melakukan pengumpulan data untuk didata kembali agar tidak ada kekeliruan dalam catatan yang sudah dicatat. Langkah Reduksi data ada beberapa tahap antara lain:

1. Mengorganisasikan data-data yang diperoleh, mengelompokkan hasil-hasil wawancara berdasarkan dengan tahapan penelitian yaitu dengan kelompok kebijakan dan peran serta meringkas data yang diperoleh dari informan atau pada saat wawancara.
2. Peneliti menyusun catatan-catatan berbagai hal termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan kelompok-kelompok dan pola-pola data. Cara yang dipakai dalam reduksi data bisa melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan atau uraian yang singkat. Menggolongkan ke dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.
3. Setelah melakukan wawancara kepada informan, peneliti membuat catatan-catatan kecil (ringkasan) ini berlangsung terus menerus sehingga wawancara selesai dilakukan. Seanjutnya berdasarkan ringkasan yang dibuat tersebut, maka peneliti membuat pilihan-pilihan tentang bagian data mana yang akan dibuang dari pola yang digunakan untuk meringkas sejumlah data-data yang masih tersebar.³⁷

b. Tahap Verifikasi Data

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 233

dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis data yang ada di lapangan dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi dalam Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Wali kota Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

c. Tahap Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan. Pada bagan ini, data yang harus disajikan telah disederhanakan dalam reduksi data dan harus ada gambaran secara menyeluruh dari kesimpulan yang diambil. Susunan kajian data yang baik adalah yang jelas sistematisnya, karena hal ini akan banyak membantu dalam penarikan kesimpulan. Adapun sajian data berupa gambar, matriks, tabel maupun bagan, selain itu data dapat ditampilkan dalam bentuk uraian atau catatan-catatan kecil yang berhubungan dengan teori penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi harus disusun dengan sistematika atau format yang lazim digunakan sesuai dengan buku panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing, sistematika untuk jenis penelitian kualitatif, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, membahas tentang:

- A. Penegasan Judul
- B. Latar Belakang Masalah
- C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Manfaat Penelitian
- G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI, membahas tentang:

- A. Efektivitas
 - 1. Pengertian Efektivitas
 - 2. Indikator Efektivitas
 - 3. Model Efektivitas
 - 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas
- B. Pemilihan Walikota
 - 1. Pengertian Pemilihan Walikota
 - 2. Dasar Hukum Pemilihan Walikota
 - 3. Partisipasi Pemilih

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, membahas tentang:

- A. Profil Kota Bandarlampung
 - 1. Sejarah Singkat Kota Bandarlampung
 - 2. Letak Geografis Kota Bandarlampung
 - 3. Topografi Kota Bandarlampung
 - 4. Demografi Kota Bandarlampung
 - 5. Pemerintahan Kota Bandarlampung

B. Profil Kecamatan Sukarame

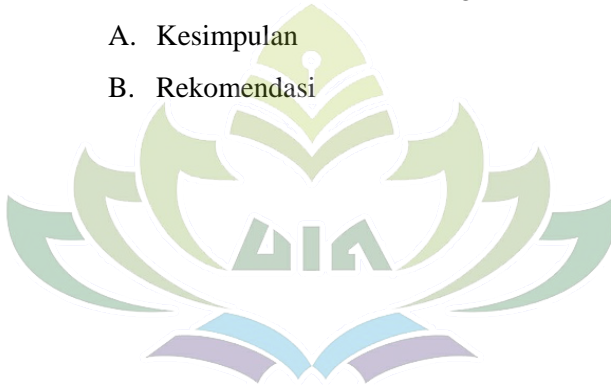
1. Sejarah Kecamatan Sukarame
2. Geografi Kecamatan
3. Demografi Kecamatan
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Sukarame

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN, membahas tentang:

- A. Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Wali kota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19

BAB V PENUTUP, membahas tentang:

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi



BAB II

EFEKTIVITAS PEMILIHAN WALI KOTA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut istilah manajemen adalah tercapainya tujuan yang direncanakan dengan mendayagunakan kemampuan manajerial organisasi.³⁸ Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya yang dicapai.³⁹

Menurut Steers Efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁴⁰ Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas biasa dilakukan untuk mengukur sejauh mana kelompok atau organisasi efektif mencapai suatu tujuan.

Menurut Gibson efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.

Sondang P. Siagian mendefinisikan efektivitas sebagai keberhasilan penerapan sasaran yang telah ditetapkan. Ini artinya

³⁸ Supardi dan Syaiful Anwar, *Dasar-Dasar Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: UII Pers, 1993), h. 7

³⁹ Dasri Nurhamidi, Ardiyan Setawan, Ong Belian. *Efektivitas Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Pada Pemilihan Umum Walikota di Palembang 2018*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 25. No.2. 2020

⁴⁰ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Air Langga, 1980), Cet. Ke-I, h. 1

jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya.⁴¹ Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Menurut Mahmudi bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* dengan tujuan, maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.⁴²

Memperhatikan pendapat diatas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan menemukan indikator efektivitas, sehingga dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas. Pengertian yang memadai mengenai tujuan ataupun sasaran organisasi merupakan langkah pertama dalam pembahasan efektivitas, dimana seringkali berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Efektivitas merupakan kriteria evaluasi yang mempertanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak.

⁴¹ Sondang P. Siagian, *Definisi Efektivitas*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001)

⁴² Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019),h.86

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan.⁴³ Apabila kita berbicara tentang efisiensi, maka maksudnya adalah bagaimana baiknya suatu organisasi bekerja dengan teknologi tertentu. Bila kita mengukur kualitas suatu produk, maka dapat melihat bagaimana efisiensi organisasi yang bersangkutan. Kalau kita berbicara tentang efektivitas, maka yang dimaksud dengannya, yaitu hubungan suatu organisasi dengan lingkungannya.⁴⁴ Efisien tetapi tidak efektif berarti dalam memanfaatkan sumberdaya (*input*) baik, tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya yang berlebihan atau lazim dikata ekonomi biaya tinggi tetapi yang paling parah adalah efisien dan tidak efektif artinya ada pemborosan sumber daya atau penghambur-hambur sumber daya tanpa mencapai sasaran. Efisiensi harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur, sedangkan efektif mengandung pada pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian efektivitas yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

⁴³ Nora Eka Putri, *Efektivitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Padang*. Jurnal Tingkap. Vol.10. No. 2. 2014

⁴⁴ J. Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2004), h. 81

2. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung kepada siapa yang menilai dan menginterpretasikannya. Dalam usaha mengukur efektivitas yang pertama sekali adalah memberikan konsep tentang efektivitas itu sendiri. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan cara membandingkan antara tahapan dan rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika suatu hasil dari rencana yang telah ditentukan tersebut tidak sesuai sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Menurut Steers dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, SDM dan perilaku manusia seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti perilaku manusia ditempat kerja.

Menurut Richard M. Steers pengukuran efektivitas digolongkan dalam 3(tiga) pendekatan yaitu:

- a. Optimasi tujuan-tujuan
- b. Perspektif sistem dan
- c. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi

Cara seperti ini disebut ancangan berdimensi ganda dan lebih objektif dari pada hanya menggunakan satu ancangan saja, misalnya hanya dari segi tujuan. Dengan ancangan optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenalnya bermacam-macam tujuan, meskipun tampaknya sering saling bertentangan. Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sama lain saling berkaitan.

Yang dimaksud dengan ancangan sistem ialah menggunakan sistem terbuka, yaitu pandangan terhadap organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. Dengan ancangan ini perhatian lebih diarahkan pada persoalan-persoalan mengenai saling hubungan, struktur dan saling ketergantungan satu sama lain. Sistem ini mencakup tiga komponen, ialah *input*, *process* dan *output*. Sebagai sistem, suatu organisasi menerima input dari lingkungannya, kemudian memprosesnya dan selanjutnya memberikan *output* kepada lingkungan. Tanpa adanya input dari lingkungannya, suatu organisasi akan mati. Demikian juga, tidak memberikan *output* kepada lingkungan, suatu organisasi akan mati. Jadi, efektivitas tidak hanya dilihat dari segi tujuan semata-mata, melainkan juga dari sistem.

Ketiga, ialah perilaku manusia dalam organisasi. Ancangan ini digunakan karena atas dasar realitanya bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya. Justru karena faktor manusianya itulah suatu organisasi dapat efektif, tetapi juga faktor manusianya lah suatu organisasi tidak efektif.⁴⁵

Mengenai hal-hal yang dikemukakan diatas, maka ukuran efektivitas merupakan standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Adapun kriteria atau pengukuran efektivitas menurut Sondang P.Siagian diantaranya yakni:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan
- c. Perencanaan yang matang
- d. Penyusunan program yang tepat dan suatu rencana yang baik

⁴⁵ Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2010),h.96

- e. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
- f. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.⁴⁶

Sehubung dengan hal-hal yang dikemukakan diatas bahwa pengukuran efektivitas dapat diukur melalui tujuan yang dicapai dengan startegi-strategi yang sebelumnya sudah ditentukan didukung oleh kebijakan yang matang serta di bantu dengan sarana dan prasarana kerja. Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun.

Kemudian ukuran atau kriteria menurut Gibson dkk, indikator efektivitas dapat diukur dengan sebagai berikut:

- a. Produktivitas, yaitu merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
- b. Kualitas, yaitu suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
- c. Efisiensi, yaitu merupakan perbandingan (*ratio*) antara *output* dengan *input*.
- d. Fleksibilitas respons terhadap suatu organisasi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu organisasi.
- e. Kepuasan, yaitu merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

⁴⁶ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002),h.77

- f. Keunggulan, yaitu kemampuan bersaing dari organisasi dan anggota organisasi terhadap perubahan-perubahan yang ada.
- g. Pengembangan, yaitu merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.⁴⁷

Sehubung dengan hal diatas bahwa efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan telah dicapai serta ukuran berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuan dan targetnya. Keefektifan harus mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dengan lingkungan sekitarnya.

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Mardiasmo menjelaskan bahwa indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program karena semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja suatu unit.

Sedangkan pengukuran efektivitas menurut Duncan dalam Steers adalah sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan, yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan pentahapan yang baik disetiap bagiannya.
- b. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan consensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan dilapangan.⁴⁸

⁴⁷ Gibson dkk, *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses*, (Jakarta:Erlangga,1989),Cet.Ke-V,h.34

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang telah di kemukan oleh Duncan dalam Steers yaitu:

- a. Pencapaian Tujuan
- b. Integrasi
- c. Adaptasi

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Walikota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

3. Model Efektivitas

Secara umum dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kemampuan atau batasan dalam mencapai tujuan-tujuan atau sasaran organisasi. Konsep efektivitas sendiri telah banyak dikemukakan oleh para ahli organisasi maupun manajemen dan memiliki makna yang berbeda tergantung kepada kerangka acuan yang digunakan. Menekankan pentingnya organisasi efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Untuk mengetahui efektivitas dalam melakukan tugas dan mencapai tujuan dapat diketahui melalui beberapa model atau pendekatan efektivitas organisasi:

a. Model Tujuan (*Goal Model*)

suatu organisasi diciptakan dan dirancang secara sengaja untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang ditentukan.

b. Model Sumber Daya Sistem

Model sumber daya sistem berkembang dari model sistem organisasi. Model sumber daya sistem menekankan akuisisi

sumber daya yang dibutuhkan sebagai kriteria penilaian efektivitas.

c. Model Multi Konstituensi (*Multiple Constituency Model*)

Multiple constituency models mengembangkan kriteria penilaian efektivitas organisasi atas dasar berbagai preferensi stakeholder yang berbeda terhadap kinerja organisasi. Ada empat model distributif. Pertama, model relativistik, perspektif kekuasaan, perspektif keadilan sosial dan evolutionary perspektif.

d. Model Nilai Bersaing (*The Competing Values Model*)

Model ini bahwa individu menilai efektivitas organisasional dengan membuat trade offs antar tiga dimensi nilai umum, yaitu fokus organisasional (tugas-orang), struktur organisasional (kendali-fleksibilitas) dan hubungan prasarana dan hasil akhir organisasional (proses keluaran).

e. Model Proses Internal

Model proses internal berkembang dari perspektif pengembangan organisasi. Model ini mendasarkan diri pada kepercayaan bahwa para individu harus mempunyai kesempatan untuk mengaktualisasi diri, mempertahankan integritas dan keunikan mereka dalam tetanan organisasional.

f. Model Legitimasi

Model legitimasi sering dibutuhkan dengan perspektif populasi ekologi. Kelangsungan hidup organisasi merupakan tujuan utama.

g. Model Ketidakefektifan

Model ketidakefektifan memusatkan pada faktor-faktor yang menghambat sukses kinerja organisasi, bukan faktor-faktor yang menyumbang pada keberhasilan.⁴⁹

⁴⁹ Edy Sutrisno, *Op.Cit.*, h.108

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah ditemukan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:

a. Adapun tujuan yang jelas

Tujuan organisasi adalah memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi.

b. Struktur organisasi

Struktur dapat mempengaruhi efektivitas dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang kaya akan fungsi dan sederhana.

c. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat

Tanpa ada dukungan dan partisipasi dari masyarakat akan sulit untuk mewujudkan organisasi yang efektif.

d. Adanya sistem nilai yang dianut.

Sistem nilai yang di anut juga merupakan aspek penting yang mempengaruhi efektivitas organisasi.⁵⁰

Sebuah organisasi akan berjalan terarah jika adanya tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas akan memberika sebuah motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan organisasi adalah untuk memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikerjar dan diwujudkan oleh organisasi. Struktur dapat mempengaruhi efektivitas dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang kaya akan fungsi dan sederhana. Selanjutnya, tanpa ada dukungan dan partisipasi serta sistem nilai yang ada tentunya maka akan sulit untuk mewujudkan organisasi yang efektif.

⁵⁰ Stephen P. Robins, *Manajemen Organisasi*, (Printice Hall, 1994), h.57

Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas. Richard M. Steers menyebutkan terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi atas efektivitas yaitu:

1. Karakteristik Organisasi

Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Mengenai struktur, ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi.

2. Karakteristik Lingkungan

Di samping karakteristik organisasi, lingkungan luar dan dalam juga berpengaruh atas efektivitas. Menurut model keberhasilan hubungan organisasi lingkungan tampaknya amat bergantung pada tiga variabel kunci yaitu :

- a. Tingkat keterdugaan keadaan lingkungan
- b. Ketepatan persepsi atas dasar lingkungan dan
- c. Tingkat rasionalitas organisasi

Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan makin tepat tanggapannya, makin berhasil adaptasi dilakukan oleh organisasi.

3. Karakteristik Pekerja

Faktor pengaruh yang penting yang ketiga atas efektivitas adalah para pekerja itu sendiri. Pada kenyataannya, para anggota organisasi mungkin merupakan faktor pengaruh yang paling penting atas efektivitas karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi.

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Terdapat beberapa mekanisme khusus untuk meningkatkan efektivitas organisasi yang meliputi:

- a. Penetapan tujuan strategi
- b. Pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien
- c. Menciptakan lingkungan prestasi
- d. Proses komunikasi
- e. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan
- f. Adaptasi dan inovasi organisasi.⁵¹

Sehubung yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, apabila salah satu unsur memiliki kinerja yang kurang baik maka tentunya akan memperburuk kinerja organisasi secara keseluruhan. Keefektifan membutuhkan kesadaran serta interaksi yang baik dengan lingkungannya karena keduanya mempunyai timbal balik. Kelangsungan hidup organisasi membutuhkan pergantian sumber daya secara terus-menerus. Suatu organisasi yang tidak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya, tetapi apabila suatu organisasi sangat memperhatikan faktor-faktor tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dapat lebih mudah untuk dicapai. Hal itu karena efektifitas akan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelihatannya hampir semua bertumpu pada pencapaian tujuan organisasi. Walaupun sejumlah kecil model yang tidak mengakui dasar semacam ini dan sering menggunakan istilah-istilah yang unik, namun bila dianalisis lebih jauh ternyata bermuara juga pada konsep tujuan.

⁵¹ Richard M.Steers,
(Jakarta:Erlangga,1985),Cet.II,h.209

B. Pemilihan Wali kota

1. Pengertian Pemilihan Wali kota

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wali kota secara langsung dan demokratis.

Dalam suatu negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, Pemilihan umum adalah salah satu wujud nyata dari demokrasi dan merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan.⁵² Pemilu merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk mengisi jabatan kenegaraan, baik eksekutif ataupun legislatif dalam periode waktu tertentu secara demokratis. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah sangat luas dan tentunya membutuhkan manajemen, sedangkan kepala negara atau presiden tidak akan mampu mengelolanya sendirian, maka harus dibentuklah sebuah lembaga-lembaga yang akan bertugas dan bekerja sama untuk mengelolah negara. Salah satunya lembaga yang terpenting ialah pemerintah daerah, yang mana setiap daerah di pimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut dengan kepala daerah. Kepala daerah untuk Provinsi disebut dengan Gubernur, Kabupaten disebut dengan Bupati dan Kota disebut dengan Walikota.

Untuk mewujudkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota secara demokratis diperlukan media untuk membentuk dan menciptakan konsep yang tepat, yang kemudian dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah. Kepala daerah merupakan media

⁵² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 60

untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945.⁵³

Pemilihan wali kota merupakan suatu mekanisme untuk menentukan pemimpin pada daerah-daerah tersebut, dengan ini masyarakat dapat menyalurkan aspirasi politiknya dengan memilih calon pemimpin berdasarkan dengan yang sudah masing-masing individu pilih sehingga dapat mencerminkan tanggung jawab warga pada negaranya. Setiap suara dari rakyat dianggap sangat penting karena dapat menentukan arah kebijakan politik lima tahun kedepan, namun masyarakat hendaknya cerdas dalam menentukan pilihan sehingga kedepannya tidak akan merugikan rakyat itu sendiri.

Kualitas pilkada juga dapat ditentukan oleh produk dari pilkada itu sendiri, yakni mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Pilkada langsung dalam penyelenggaraannya memiliki beberapa dampak positif sebagai berikut:

- a. Demokrasi langsung makna kedaulatan ditangan rakyat akan terlihat secara nyata.
- b. Menghasilkan kepala daerah yang mendapat dukungan secara luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat.
- c. Dari pilkada langsung, suara rakyat menjadi sangat berharga, sehingga rakyat mendapatkan perhatian yang sangat besar dari kepala daerah dan pemerintah daerah.

Namun selain dari dampak positif, pilkada langsung masih terdapat beberapa dampak negatif ataupun kekurangan yang sampai kini belum bisa teratasi, sebagai berikut:

- a. Memerlukan anggaran biaya yang sangat besar.
- b. Mengutamakan calon berdasarkan aspek akseptabilitas dan mengurangi kapabilitas untuk memimpin organisasi maupun masyarakat.
- c. Kemungkinan terjadinya konflik antar pendukung.

⁵³ Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2.No.2

- d. Terjadinya koluasi dan money politics.
- e. Apabila terdapat banyak kecurangan dalam penyelenggaraan pilkada langsung, rakyat tidak akan percaya pada sistem yang ada.⁵⁴

Bandarlampung merupakan salah satu kota yang juga melaksanakan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandarlampung pertama kali dilaksanakan pada tahun 1965 yang kemudian terpilihnya Sumarsono sebagai wali kota pertama kota Bandarlampung.

Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandarlampung periode 2020-2025 melibatkan 126 Kelurahan dan 20 Kecamatan yang ada di kota Bandarlampung. Adapun dalam pemilihan wali kota ini diikuti oleh tiga pasang calon yaitu Rycko Menza-Johan Sulaiman, Yusuf Kohar-Tulus Purnomo dan Eva Dwiana-Deddy Amrullah.

Berikut penjelasan mengenai syarat calon menjadi kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2), sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
4. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur 25 (dua puluh lima) tahun serta untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota

⁵⁴ Wasistino & Sumihardjo, *Kapita Selekt: Manajemen Pemerintahan Daerah*,(Bandung:Vokus Media,2003),h.122

5. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh tim.
6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi
13. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama 2(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota.
14. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati/wali kota untuk calon wakil bupati/calon wakil wali kota pada daerah yang sama.
15. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.

16. Tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat walikota.
17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai tentara nasional Indonesia, kepolisian negara republik Indonesia dan pegawai negeri sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, dan
18. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) sebagaimana yang telah di sebutkan diatas.

Pemilihan kepala daerah terdiri dari dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pada Pasal 5 ayat (2) dan (3). Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- a. Tahapan Persiapan meliputi:
 1. Perencanaan program dan anggaran
 2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
 3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan.
 4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
 5. Pembentukan Panwas kabupaten/kota, Panwas kecamatan, PPL dan Pengawas TPS
 6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan dan
 7. Penyerahan dan daftar penduduk potensial pemilih

8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
- b. Tahapan pelaksanaan meliputi:
 1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota.
 2. Pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota.
 3. Penelitian persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota.
 4. Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil wali kota.
 5. Pelaksanaan kampanye
 6. Pelaksanaan pemungutan suara
 7. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara
 8. Penetapan calon terpilih
 9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, dan
 10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan hasil perbaikan dari tahapan yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang.

2. Dasar Hukum Pemilihan Wali kota

Mengacu pada Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang, selain itu juga setiap daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan otonomi daerah dimana setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah, hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 didalam Pasal 18 Ayat (4) yakni dimana Gubernur, Bupati dan Wali kota di pilih secara demokratis guna berfungsi untuk memimpin daerahnya yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat yang sudah memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah, melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemaknaan arti kata demokratis dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah di dalam Pasal 24 Ayat (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.⁵⁵

Berdasarkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan:

- a. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- b. Pasangan calon sebagaimana disebut pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi

⁵⁵ Eko Noer Kristiyan to, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Vol.17.No.1,Maret Tahun 2017,h.49

persyaratan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang ini.⁵⁶

Dalam penyelenggaraan pilkada telah diatur dalam Undang-Undang berikut yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan pilkada yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang.⁵⁷

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota atau Pilkada Serentak 2020 yang rencanya dilaksanakan bulan September 2020 harus ditunda karena situasi negara yang belum memungkinkan untuk melaksanakan pemilu dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan yang ada dalam perpu tersebut

⁵⁶ Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁷ <http://perludem.org> (Diakses Pada Kamis 25 Maret 2021)

yakni perubahan Pasal 120 serta Penambahan Pasal 122A dan 201A. Adapun secara lengkapnya sebagai berikut:

Perubahan pada Pasal 120 ayat (1) yang bunyinya menjadi “Dalam hal pada sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan”.

“Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti” bunyi Pasal 120 ayat (2) Perpu Nomor 2 Tahun 2020.

Diantara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 1 (satu) pasal, untuk pasal 122A yang pada pasal 122A ayat (1) berbunyi “Pemilihan serentak dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan”.

Menurut Pasal 122A ayat (2), penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan diatur dalam peraturan KPU, bunyi Pasal 122A ayat (3).

Selanjutnya, diantara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan 1 (satu) pasal, untuk Pasal 201A ayat (1) yang berbunyi “Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1)”.

“Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020”, bunyi Pasal 122 ayat (2). Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat

dilaksanakan, menurut pasal 122 ayat (2), pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 122A. “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”, bunyi pasal II Perpu Nomor 2 Tahun 2020.

Namun Pada Desember, Pilkada serentak 2020 kembali dilanjutkan dengan berlandaskan pada Peraturan KPU (PKPU) No. 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau/ Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Bandar Lampung di selenggarakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor:205/PL.02-Kpt/1871/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Bandar Lampung Lanjutan tahun 2020.

3. Partisipasi Pemilih

Salah satu ciri negara hukum yaitu adanya sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Penyelenggaraan sistem demokrasi negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki wewenang untuk memaksakan kehendaknya pada warga negaranya. Pilkada langsung sejatinya merupakan jalan demokrasi dan amanat konstitusi Indonesia yang harus terselenggara secara demokratis. Pilkada yang demokratis menjadi lambang sekaligus salah satu tolak ukur demokrasi modern di Indonesia apabila hasilnya menjadi cerminan partisipasi dan aspirasi masyarakat serta diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan. Suatu pemilu yang demokratis adalah memenuhi tiga persyaratan demokrasi yaitu:

- a. Adanya kompetisi memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.
- b. Adanya partisipasi masyarakat.
- c. Adanya jaminan hak-hak sipil dan politik.⁵⁸

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak memilih sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pada Pasal 56 yang menyebutkan bahwa:

1. Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.
2. Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.
3. Jika pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan /atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.

Selanjutnya mengenai menggunakan hak memilih diatur pada pasal 57 yang menyebutkan:

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk pada saat pemungutan suara.
3. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

⁵⁸ Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia:Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010),h.83

- a. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
4. Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu yang harus dihadirkan dalam pemilu karena apabila partisipasi masyarakat tidak atau kurang hadir maka pemilu yang dilaksanakan bukan pemilu demokratis. Tahapan-tahapan pilkada sejatinya sangat memerlukan partisipasi warga dalam penyelenggaraannya.

Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi politik menurut Budiarmo, Partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memperngaruhi kebijakan pemerintah (public policy).⁵⁹ Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action* dan sebagainya.⁶⁰

Dalam sebuah negara demokratis, yang mendasari sebuah konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk mencapai tujuan serta masa depan sebuah negara itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang posisi

⁵⁹ Mariam Budiarmo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h.1

⁶⁰ Mariam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.367

pemimpin.⁶¹ Dengan pengertian mengenai partisipasi politik diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah ikut sertanya individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses kehidupan politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga berupa yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Partisipasi politik dalam pilkada merupakan bagian dari partisipasi politik secara umum. Partisipasi politik warga negara dalam pilkada adalah partisipasi elektoral (voter turnout). Partisipasi elektoral ini terbagi kedalam dua kategori yakni yang sifatnya konvensional dan non-konvensional. Partisipasi elektoral yang konvensional berkenaan dengan tingkat kehadiran pemilih dibalik suara sedangkan non-konvensional sifatnya lebih luas berupa keterlibatan warga pada proses-proses pemilu seperti kampanye, menjadi relawan dan lain-lain.

Pertama, partisipasi elektoral yang konvensional dalam pilkada sangat terkait dengan kepemilikan hak warga negara sebagai pemilih. Warga negara yang memiliki hak memilih dalam pilkada adalah penduduk yang berusia rendah 17(tujuh belas) sebagaimana ketentuan UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 8 Tahun 2015. Selain itu, warga negara yang sudah memenuhi kriteria tersebut baru dapat menggunakan hak pilih bila sudah terdaftar sebagai pemilih di KPU. Namun apabila tidak terdaftar, pemilih harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk pada saat pemungutan suara agar dapat menunaikan haknya untuk memilih dalam pilkada mengacu pada Pasal 57 Perpu No. 1 Tahun 2014. Kedua partisipasi elektoral yang non-konvensional sangat terkait dengan partisipasi warga negara selama tahapan pilkada. Warga harus terlibat dalam setiap tahapan pilkada misalnya dalam tahap penentuan bakal calon dari salah satu gabungan partai politik, saat kegiatan

⁶¹ M.ilham Wahyudi, M.Fachri Adnan, *Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018*. Jurnal Perspektif Kajian Sosiologi dan Pendidikan. Vol.2.No.3.Tahun 2019,h.159

kampanye, debat pilkada, hari pemilihan dan penghitungan dan sebagainya.

Partisipasi warga pada tahapan pilkada tersebut harus ditujukan untuk mensukseskan terselenggaranya pilkada yang demokratis. Meski demikian, partisipasi yang dilakukan harus ditujukan untuk mendukung terwujudnya pilkada yang demokratis seperti peningkatan kualitas kompetisi antar kandidat pilkada dan pemenuhan hak kebebasan warga negara untuk memilih dalam pilkada.⁶²

Momentum pilkada secara langsung sebagai proses pembelajaran politik masyarakat politik di daerah. Konteks pembelajaran politik ini meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Pilkada secara langsung sangat menuntut kesiapan rakyat untuk bisa mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya, sehingga bentuk sikap politiknya merupakan cerminan dari kebutuhan yang ingin diwujudkan oleh rakyat dan pimpinannya.
- b. Rakyat mempunyai kedaulatan penuh untuk mendefinisikan pilihan politiknya terhadap figur calon kepala daerah yang diinginkan secara benar dan tepat, sehingga kualitas partisipasi masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara langsung. Kemandirian ini dengan sendirinya mengeliminasi adanya potensi-potensi mobilitas pemilih yang hanya legitimate oleh sebagian elite politik atau kelompok tertentu saja.
- c. Rakyat sangat dituntut kedewasaan politiknya. Artinya mereka harus siap memilih dan menentukan kepala daerah dalam pilkada sesuai pilihan politiknya.⁶³

⁶² Cucu Sutrisno, *Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.2.No.2, Juli Tahun 2017, h.40

⁶³ Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.227

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Narbuko Cholid dkk, 2013. *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Remaja Rosdakarya)
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)
- De Lexi J. Moelong, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung :Remaja Rosdakarya)
- Suprayogo Imam dkk, 2003. *Metodelogi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Soehartono Irawan, 2008. *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Asshiddiqie Jimly, 2016. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Kartono Kartini, 1999. *Pengantar Metodelogi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju)
- Koentjaraningrat, 1981. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka)
- Thoah Miftah, 2016. *Birokrasi & Politik di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Ahmad Nadir, 2006. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi* (Malang: Averroes Press)
- Huda Ni'matul, 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Adisasmita Rahardjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Gibson dkk, 1989. *Organisasi dan Manajemen Produktivitas Struktur Proses Cet. V* (Jakarta: Erlangga)
- Subekti Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia)

- M.S Kaelan, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Filsafat* (Yogyakarta: Paradikma)
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta)
- Sutrisno Hadi, 1985. *Metode Research* (Yogyakarta: YPFAK, Psikologi UGM)
- Nawawi Haidar, 1987. *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Guma Press)
- Gibson dkk, 2001. *Organisasi* (Jakarta: Erlangga)
- Steers M. Richard, 1990. *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Airlangga)
- Supardi dkk, 1993. *Dasar-Dasar Perilaku Organisasi* (Yogyakarta: UII Pers)
- P. Siagian Sondang, 2001. *Definisi Efektivitas* (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Winardi J, 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi* (Jakarta: Prenadamedia Group)
- P. Siagian Sondang, 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Sutrisno Edy, 2010. *Budaya Organisasi* (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Moh. Mahfud, 2009. *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Prasetyo Eko dkk, 2008. *Desentralisasi Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural* (Jakarta: Gramedia)
- Wasistino dkk, 2003. *Kapita Selekta: Manajemen Pemerintahan Daerah* (Bandung: Vokus Media)
- Marijan dkk, 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)
- Budiarjo Mariam, 1998. *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)

- Mardiasmo, 2017. *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset)
- Mahmudi, 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN)
- Budiarjo Mariam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Aminah Siti, 2014. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal* (Jakarta: Prenamedia Group)
- Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta)
- Robbins, 1994. *Manajemen Organisasi* (Jakarta: Prentice Hall)
- Hadi Sutrisno, 2000. *Metode Research Jilid II* (Yogyakarta: Andi Offset)
- M.Steers Richard, 1999. *Efektivitas Organisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- P.Stephen Robbins,1999. *Perilaku Organisasi:konsep,kontroversi,aplikasi* (Jakarta: Prenhallindo)
- Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2004. *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul Ali Art)

Sumber Jurnal :

- Achmad Arifulloh, *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis,Damai dan Bermatabat*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.2 No.2 (2015), 302
- Ali Abdul Wakhid, *Good Governance dan Reformasi Birokrasi Mendukung Pembangunan Hukum*, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol.5 No.10. (2009), 72
- M. Noor Aziz, *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (2011), 49
- Muhammad Zein Abdullah, *Strategi Komunikasi Politik dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara*

Langsung di Indonesia, Jurnal Observasi, Vol.6. No.1. (2008), 101

Abdul Qohar, *Revitalisasi Manajemen Pemerintahan Modern*, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol.8 No. (2012), 47

Suaiba, *Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ,Vol.26. No.2 (2020), 239

Adi Abdul Kadir, Michael Mamentu, Trintje Lambey, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan di Kecamatan Tidore Tahun 2015*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.2. No. 2 (2017), 2

Eko Nur Kristiyanto, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.17. No. 1, (2017), 49

Dasri Nurhamidi, Ardiyan Setawan, Ong Belian, *Efektivitas Pengawasan Alat Peraga Pada Pemilihan Umum Walikota Palembang*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.25. No.2 (2020)

Nora Eka Putri, *Efektivitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Kota Padang*, Jurnal Tingkap, Vol.10. No.2, (2014)

Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.2

M. Ilham Wahyudi & M.Fachri Adnan, *Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018*, Jurnal Perspektif Kajian Sosiologi dan Pendidikan. Vol.2. No.3, (2019), h.159

Cucu Sutrisno, *Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vo.2. No.2 (2014), 22

Sumber Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 Ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2020

Sumber Online:

Kpu (Komisi Pemilihan Umum),

<https://data.kpu.go.id/dps.2015.php>

<https://ftp.saibumi.com>

<https://jdih.kpu.go.id>

<https://www.bbc.com>

<http://perludem.org>

Sumber Wawancara:

Dedy Triadi, Kepala KPU Kota Bandar Lampung, Pada tanggal 07 Juni 2021, Pukul 10:21 WIB

Ika Kartika, Ketua Divisi Program dan Data KPU Kota Bandar Lampung, Pada tanggal 09 Juni 2021, Pukul 13:34 WIB

Hamami, Ketua Divisi Sosialisasi dan Parmas KPU Kota
Bandarlampung, Pada tanggal 07 Juni 2021, Pukul 10:38
WIB

Udo Panji Ismoyo, Sekretaris Camat Kecamatan Sukarame, Pada
tanggal 14 Juni 2021, Pukul 10:57 WIB

Suwarsi, Masyarakat Kelurahan Sukarame, Pada tanggal 17 Juni
2021, Pukul 13:03 WIB

Isjayanti, Masyarakat Kelurahan Way Dadi, Pada tanggal 17 Juni
2021, Pukul 14:10 WIB

Riska, Masyarakat Kelurahan Sukarame Baru, Pada tanggal 17 Juni
2021, Pukul 15:37 WIB

Hanun, Masyarakat Kelurahan Harapan Jaya, Pada tanggal 18 Juni
2021, Pukul 10:06 WIB

Tita, Masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru, Pada tanggal 18 Juni
2021, Pukul 11:32 WIB

Messy, Masyarakat Kelurahan Korpri Raya, Pada tanggal 18 Juni
2021, Pukul 13.45 WIB

